
PLURALISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEAGAMAAN KRISTEN DAN KATOLIK DI KABUPATEN BANGKALAN

Indra Jaya Kusuma Wardhana, Merlia Indah Prastiwi, dan Klaudius Febrianto Ari Suseno

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: indra.wardhana@trunojoyo.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diserahkan 2 April 2024
Direvisi 28 Mei 2024
Disetujui 28 Mei 2024

Keywords:
identity,
education,
religion,
pluralism

Abstract

This research aims to take a space that has not received attention in the field of education that intersects with the complexity of community elements towards religious minority groups. Therefore, it is important to tackle the conception of pluralism in the implementation of non-Muslim religious-based education as a representation of the diversity of multicultural values of Madura.

This research uses a qualitative methodology with an ethnomethodological approach. This study focuses on the assumption of "subjectivity" through the interpretive actions of community members who produce and organize daily experiences related to inter-religious tolerance values. The focus of this study concern a views of stakeholders, including the organizational structure of educational institutions and local government officials regarding the implementation of non-Muslim religious-based education as a representation of minority groups. Bangkalan Regency was chosen as the research location, referring to the highest proportion of Christian and Catholic population among the four regencies on Madura Island.

The results of this study show the attitude of tolerance between religious communities as a representation of pluralism, especially for religious minority groups in the field of education provision that occurs in Bangkalan Regency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengambil ruang yang belum mendapat perhatian di bidang pendidikan yang bersinggungan dengan kompleksitas elemen masyarakat terhadap kelompok minoritas keagamaan. Oleh karena itu, menjadi penting studi mengenai konsepsi pluralisme dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan non-muslim sebagai representasi diversitas nilai-nilai multikultural ke-Madura.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan etnometodologi. Studi ini menitikberatkan pada asumsi "subjektivitas" melalui tindakan interpretatif dari anggota masyarakat yang memproduksi serta mengorganisir pengalaman sehari-hari terkait nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Fokus kajian ini mengarah pada pandangan stakeholder meliputi struktur organisasi lembaga pendidikan dan perangkat pemerintahan daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan non-muslim sebagai representasi kelompok minoritas. Adapun, Kabupaten Bangkalan dipilih sebagai lokasi penelitian, merujuk pada proporsisi penduduk beragama Kristen dan Katolik tertinggi diantara 4 kabupaten di Pulau Madura.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama sebagai representasi pluralisme, khususnya bagi kelompok minoritas keagamaan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan.

PENDAHULUAN

Identitas dan Madura merupakan realitas yang unik. Citra yang melekat pada Madura beserta karakteristik masyarakatnya beririsan dengan aspek sosio-kultural yang dipersepsikan secara positif maupun negatif. Keislaman sebagai ciri religiusitas masyarakat Etnik Madura begitu kental dan mengakar yang tercermin pada tradisi dan mayoritas pemeluk agama Islam. Sedangkan simbolisasi kultur dan tradisi carok misalnya, melekat kuat sebagai bentuk kekerasan sebagai bagian dari konflik sosial. Wiyata menjelaskan, tradisi carok menampilkan kesan dan persepsi negatif yang menakutkan pada orang luar Madura (Wiyata, 2006). Sebagaimana Huub De Jonge menambahkan bahwa tidak banyak etnis di Indonesia yang menyanggah stereotip negatif sebagaimana Etnis Madura (De Jonge, 2012).

Bertolak belakang pada realitas sosial tersebut, kehidupan sosial di Pulau Madura berjalan cukup harmonis dan toleran atas keberagaman karakteristik masyarakatnya. Pulau Madura dengan segala citra negatif dan isu-isu sosial yang berkembang, nyatanya memiliki diversitas karakteristik masyarakat yang tercermin melalui keberadaan etnis maupun kelompok keagamaan yang berbeda. Dalam konteks etnisitas misalnya, terdapat sekitar 244.393 jiwa (0,65%) etnis Tionghoa yang tersebar di provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya pulau Madura. (Badan Pusat Statistik, 2010) Sedangkan pada aspek keyakinan, terdapat minoritas keagamaan di pulau Madura sebesar 3.838 dari 3.888.112 jiwa atau 0,1% dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2023). Jumlah tersebut terdiri dari 2.284 beragama Kristen, 1.232 beragama Katolik, 29 beragama Hindu, 209 beragama Budha, dan 79 beragama lainnya. Diantara 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura, Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah penduduk non-muslim tertinggi dengan 1.655 jiwa. Diikuti oleh Kabupaten Sumenep dengan 1.361 jiwa, Kabupaten Pamekasan dengan 549 jiwa, dan Kabupaten Sampang dengan 268 jiwa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten dan Agama yang dianut di Pulau Madura – Sumber Data BPS Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep dalam Angka Tahun 2023.

	BANG- KALAN	SAM- PANG	PAME- KASAN	SUMENEP	TOTAL
ISLAM	1.081.104	972.693	811.661	1.018.821	3.884.279
KRISTEN	1.070	193	394	627	2.284
KATOLIK	466	64	155	547	1.232
HINDHU	18	2	-	9	29
BUDHA	100	3	-	106	209
LAINNYA	1	6	-	72	79
TOTAL	1.082.759	972.961	812.210	1.020.182	3.888.112

Dari data di atas, sukar ditemukan kasus maupun pemberitaan mengenai konflik antar umat beragama bersifat masif maupun mendapat *eksposure* di pulau Madura. Artinya, pulau Madura cukup ramah terhadap kemajemukan umat beragama. Hal ini teraktualisasi pada konsepsi melalui hubungan sosial serta bentuk-bentuk sikap dan perilaku masyarakat Madura terhadap keberadaan kelompok minoritas beragama. Kerukunan hidup atas perbedaan yang ada di masyarakat Madura dapat kita jumpai melalui berdirinya tempat peribadatan seperti halnya Gereja, Pura dan Vihara sebagai representasi toleransi dan pluralisme.

Identitas menjadi menjadi bagian tak terpisahkan dalam penentuan institusi pendidikan. Beberapa asumsi dijadikan pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah bagi anaknya. Salah satu pertimbangan utama yang menjadi dasar penentuan sekolah ialah identitas keagamaan. Sebagaimana Max Weber, memandang tindakan rasionalitas instrumental menjadi tindakan yang ditentukan dengan harapan-harapan yang mengarah pada suatu tujuan dengan pertimbangan tertentu (Ritzer & Goodman, 2011). Oleh karena itu, wajar kiranya peserta didik cenderung menempuh pendidikan yang mengakomodir sistem keyakinannya. Dengan demikian, maka penentuan sekolah dijelaskan berdasarkan fungsinya dalam sistem keluarga, sistem keluarga dijelaskan oleh budaya, dan yang terakhir dijelaskan berdasarkan fungsinya bagi masyarakat dan seterusnya.

Hadirnya lembaga-lembaga pendidikan berbasis keagamaan merupakan katalisator kurikulum yang mengakomodir keyakinan peserta didiknya. Menurut Sirozi dalam bukunya berjudul “Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan”, kelompok masyarakat yang merasa tertekan dengan imperialisme budaya melalui penyeragaman

sistem pendidikan nasional cenderung menginginkan identitas kelompoknya (Sirozi, 2005). Oleh karena itu, muatan nilai-nilai keagamaan dalam proses penyelenggaraan pendidikan, memiliki perbedaan penyelenggaraan sebagaimana sekolah-sekolah pada umumnya. Dengan demikian, wajar apabila pulau Madura yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim memiliki banyak lembaga pendidikan berbasis keagamaan Islam. Beberapa contoh lembaga pendidikan berbasis keagamaan Islam diantaranya pondok pesantren serta pendidikan setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah). Sedangkan bagi kelompok minoritas seperti halnya pemeluk agama Kristen dan Katolik, memperoleh ruang penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan dengan didirikannya sekolah Kristen dan Katolik.

Beberapa studi telah mengkaji mengenai kemajemukan masyarakat di pulau Madura. Namun isu-isu sosial yang diangkat sebatas toleransi antar umat beragama dan atau etnisitas yang bersifat universal. Sedangkan aspek-aspek yang bersinggungan langsung dengan bidang-bidang tertentu dalam kompleksitas elemen-elemen masyarakat, belum terlalu mendapat perhatian khusus seperti halnya bidang pendidikan. Oleh karena itu, penting kiranya melihat realitas sosial dari sisi lain terkait representasi sikap toleran dalam pluralisme di bidang pendidikan yang ada di pulau Madura terhadap kelompok minoritas keagamaan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya Sayekti et al., (2022); Suntoro, (2019); Widodo et al., (2021); Amtu et al., (2021); & Lubis et al., (2022) yang juga membahas sikap dan nilai-nilai toleransi serta implikasinya dalam pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnometodologi. Pendekatan etnometodologi, berpijak pada asumsi subjektivitas anggota masyarakat melalui tindakan interpretatif yang memproduksi dan mengorganisir pengalaman sehari-hari akan realitas objektif (Denzin & Lincoln, 2009). Dengan menggunakan pendekatan etnometodologi, dimungkinkan informasi dalam hal ini *stakeholder* terkait meliputi struktur organisasi lembaga pendidikan dan perangkat pemerintahan daerah mampu merefleksikan pengalaman mengenai toleransi terhadap kelompok minoritas keagamaan dalam

penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan Kristen dan Katolik di Kabupaten Bangkalan Madura. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bangkalan, yakni lembaga-lembaga pendidikan berbasis keagamaan Kristen dan Katolik serta kantor administratif pemerintahan daerah. Subjek penelitian ini adalah informan dalam struktur organisasi kelembagaan lembaga pendidikan berbasis keagamaan Kristen dan Katolik serta perangkat pemerintahan daerah setempat di Kabupaten Bangkalan guna memperoleh data penelitian yang diperlukan dalam mengungkap realitas sosial terkait konsepsi pluralisme dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan pada kelompok minoritas keagamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Citra mengenai Madura yang lekat dengan identitas ke-Islamannya, nyatanya menghadirkan ruang bagi kehadiran umat beragama non-muslim yang hidup selaras dan harmonis. Bertolakbelakang dengan stereotip yang mengakar kuat pada identitas ke-Maduraan, konflik antar umat beragama tampak tidak kentara pada hubungan sosial masyarakatnya. Sebaliknya, pola interaksi yang terjalin pada hubungan sosial antar umat beragama mencerminkan nilai-nilai pluralitas sebagai simbolisasi multikulturalisme. Beberapa nilai-nilai toleransi antar umat beragama tercermin melalui sikap penerimaan, empati, kepedulian terhadap keanekaragaman kultural, saling percaya dan mendukung satu sama lain, serta kesediaan hidup bersama dan berdampingan. Nilai-nilai keseharian tersebut sekaligus menjadi antitesa atas stereotip yang menggambarkan citra Madura yang syarat akan konflik sosial yang terjadi di kehidupan bermasyarakat.

Toleransi antar umat beragama di Madura secara umum, dan Kabupaten Bangkalan secara khusus dibangun atas dasar kesadaran sosial masyarakat yang kuat. Kesadaran tersebut terjalin bukan atas dasar nilai-nilai formal, melainkan nilai-nilai sosial dalam proses historis yang panjang. Dalam perspektif historiografi, perkembangan agama Kristen di pulau Madura terjadi abad ke-19 ditengah penyebaran agama Islam yang sudah meluas lebih dahulu sejak abad ke-14. Ketegangan sempat terjadi dalam hubungan Muslim-Kristen yang dipengaruhi oleh perdebatan mengenai eksklusivitas dan inklusivitas agama. (Siddiq, 2023) Kristen pada masa penyebaran agama awal misalnya, mendapatkan penolakan dari masyarakat Madura yang mayoritas masyarakatnya telah memeluk agama Islam.

Wacana hubungan antar umat beragama melibatkan aktivitas sosial yang menciptakan jarak budaya antara masyarakat beragama Kristen dan Islam. Pertentangan kebudayaan merupakan akibat langsung dari konflik antar kebudayaan (Sanapiah, 1980). Satu sisi mayoritas muslim melestarikan Islam sebagai identitas ke-Madura-an-nya. Sisi lain, Kristen Madura sebagai agama minoritas mendapat tantangan dari resistensi sosial melalui instrumen keagamaan. Oleh karena itu, konsep mengenai perjumpaan sosial kini menjadi nilai kultural yang menciptakan sikap toleransi antar umat beragama dalam hubungan sosial bermasyarakat dimana identitas bersifat reflektif. Sebagaimana gagasan Yudi Latif, pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan dianggap penting bukan saja sebagai sumber legitimasi kultural dari model dan sistem pendidikan sesuai keyakinan, melainkan juga sebagai arena perjuangan kuasa (Latief, 2005).

Perjumpaan Sosial Islam-Kristen Madura

Madura secara kultural melekatkan Islam sebagai identitas lokal yang berkembang selama berabad-abad dalam sejarah panjang. Identitas keislaman, selaras dengan hadirnya tiga elemen penting yang hadir pada kehidupan sosial bermasyarakat, antara lain: 1) Pesantren sebagai sistem pendidikan Islam; 2) Nahdatul Ulama sebagai organisasi muslim; 3) Kiai sebagai representasi otoritas Islam. Budaya santri misalnya, mengakar kuat sebagai identitas ke-Madura-an yang mengaburkan antara tradisi kultural dan tradisi keagamaan pada kehidupan sosial masyarakat (Pribadi, 2013). Hal ini dikaitkan dengan nilai-nilai religiusitas Islam yang cenderung diasosiasikan masyarakat etnis Madura sebagai identitas kultural sebagai nilai kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagaimana Rebecca Kim menunjukkan batasan etnisitas dan agama mengakar pada hubungan jangka panjang antara transformasi sosial dan revitalisasi agama (Siddiq, 2023). Tampak wajar kiranya, masyarakat Madura identik dengan identitas Islam. Dengan kata lain, menjadi orang Madura secara kultural berarti menjadi seorang Muslim.

Berbeda halnya dengan minoritas Kristen Madura sebagai agama minoritas, hubungan sosial antar umat beragama memiliki kegamaan pada jalinan hubungan sosial antar umat beragama dalam bermasyarakat. Hal ini berkaitan dengan pola interaksi antar umat beragama antara Muslim-Kristen Madura terkait aktivitas sosial. Melanjutkan penuturan masyarakat Madura dalam memandang diferensiasi agama, hubungan sosial yang terjalin

antar umat beragama di Kabupaten Bangkalan berjalan harmonis pada aktivitas sosial sehari-hari. Adapun singgungan akan interaksi sosial didasari perbedaan keyakinan yang memiliki potensi konflik sosial, minim terjadi dan tidak bersifat konfrontatif. Toleransi antar umat beragama yang memuat nilai-nilai multikulturalisme menjadi instrumen penting dari resistensi sosial masyarakat Kristen Madura dalam hubungan sosial masyarakat. Grioux membuat perbedaan antara oposisi dan resistensi. Dimana oposisi cenderung melawan aturan-aturan yang ada, sedangkan resistensi menolak aturan-aturan dasar untuk berpartisipasi aktif dalam usaha mendekonstruksi kerangka yang menjadi landasan dasar (Fairlough, 1995).

Beberapa pendapat dari tokoh agama maupun perangkat pemerintahan terkait hubungan sosial antar umat beragama di Kabupaten Bangkalan, digambarkan sebagai hubungan yang cukup toleran satu dengan yang lain. Satu sisi, menghargai Islam sebagai nilai religiusitas yang berkembang di Madura sebagai keyakinan yang melebur secara kultural. Sisi lain, mempertahankan keyakinan keagamaan Kristiani dalam jalinan hubungan sosial bermasyarakat. Pola adaptif menjadi proses integrasi identitas sosial dimana umat Kristen Madura, tidak menganggap kultur Islam yang melekat pada identitas ke-Madura-an sebagai ancaman namun sebagai peleburan kultur lokal. Artinya, masyarakat Kristen-Madura memiliki kesamaan akan kedekatan kultural atas tradisi Islam di luar keyakinan religiusitasnya dalam hal praktik-praktik budaya. Catherine E. Amiot mengemukakan bahwa adaptasi dan dukungan sosial dapat menjadi mekanisme masyarakat menuju integrasi identitas sosial (Amiot et al, 2007).

Komunitas Kristen Madura di Kabupaten Bangkalan melambangkan kehidupan dan pengalaman minoritas masyarakat Kristiani di tengah lingkungan sosial mayoritas Muslim. Masyarakat yang beragama Kristen dan Islam menghargai tradisi yang sama meski berbeda keyakinan. Menurut penuturan salah satu tokoh agama, masyarakat Madura yang beragama Kristen dan Islam menganut tradisi yang sama meski berbeda keyakinan. Pola komunikasi publik yang terjalin serta bersifat terbuka antar umat beragama Muslim-Kristen Madura, mencerminkan interaksi afinitas. Hal ini digambarkan oleh Jeremy Menchik sebagai toleransi komunal yang memisahkan antara urusan agama dan sosial dalam hubungan sosial bermasyarakat (Menchik, 2016).

Aktivitas sosial antar masyarakat Muslim-Kristen Madura didasari atas kesamaan identitas ke-Madura-an dalam praktik sosial yang setara berdasarkan nilai-nilai kultural. Oleh karena itu, masyarakat Muslim-Kristen mempraktikkan tradisi Madura dalam aktivitas sehari-hari dalam interaksi sosial didasari identitas dan keterlibatan bersama dan setara berdasarkan asal-usul budaya. Konektivitas Islam dengan kultur Madura merupakan fakta budaya yang mengakar dalam tradisi dan budaya Madura. Dalam hal ini, konteks keislaman pada kultur Madura bukan sebagai doktrin agama, melainkan sebagai bagian dari sarana kebudayaan. Meski demikian, percampuran budaya dan agama yang beririsan tidak sepenuhnya utuh guna menimbang kondisi sosial masyarakat. Sebagai contoh misalnya, Gereja Kristen-Katolik di Bangkalan Madura tidak menggunakan bahasa Madura dalam upacara keagamaan menimbang jemaat Kristen di gereja sebagaimana masyarakatnya adalah non-Madura. Adapun karakteristik sosial umat Kristen Madura memiliki irisan etnisitas yang berbeda. Dimana sebagaimana masyarakat Kristen di Kabupaten Bangkalan Madura, beretnis Tionghoa. Resistensi sosial hadir sebagai persoalan yang bersifat problematis. Satu sisi masyarakat Kristen beretnis Tionghoa tidak bisa terlibat dan melebur secara utuh pada tradisi ke-Madura-an. Sisi lain, beberapa realitas masyarakat Kristen Tionghoa tidak dapat sepenuhnya diterima dalam kehidupan masyarakat Madura karena perbedaan tradisi Ke-Madura-an yang didasari atas kultur etnisitas yang melekat kuat.

Pola hubungan Muslim-Kristen Madura di Kabupaten Bangkalan, tampak begitu harmonis dalam aktivitas dan atau praktik sosial kehidupan sehari-hari. Relasi sosial antar umat beragama diperlukan untuk mereduksi potensi masalah-masalah sosial mengatasnamakan keagamaan. Hubungan sosial yang memuat nilai-nilai toleran antar umat beragama dapat terjalin melalui interaksi tokoh-tokoh keagamaan. Adapun beberapa aktivitas sosial yang merepresentasikan nilai-nilai toleransi sebagai ciri masyarakat multikulturalisme ialah keterlibatan perayaan maupun tradisi keagamaan Muslim-Kristen satu dengan yang lain. Sebagaimana Joachim Wach (1992) menuturkan konsep pengalaman keagamaan yang toleran ditunjukkan melalui 3 hal, antara lain: 1). Pemikiran; 2) Perbuatan; 3) Persekutuan.

Pluralitas Penyelenggaran Pendidikan berbasis Keagamaan Kristen-Katolik

Perjumpaan sosial menjadi ruang yang mempertemukan unsur budaya, termasuk agama didalamnya pada komunitas masyarakat. Artinya, tidak ada unsur budaya yang tidak tersentuh dan terpengaruh oleh unsur lain. Disaat bersamaan, kehadiran agama satu dengan yang lain di dalam suatu komunitas masyarakat merupakan ciri masyarakat majemuk atau bersifat heterogen. Sebagaimana Paul F. Knitter menggambarkan pluralitas budaya, khususnya agama yang telah menjadi realitas mutlak di komunitas masyarakat (Rambitan, 2017), Sehingga untuk menjaga realitas plural agama-agama diperlukan sikap-sikap toleran melalui dialog antar umat beragama. Pluralisme agama dipahami sebagai penerimaan atas realitas kehadiran agama-agama lain berbeda di dalam suatu komunitas masyarakat melalui sikap toleran yang mendukung kerukunan serta menghindari konflik guna menciptakan integrasi sosial.

Beranjak pada tafsir mengenai makna pluralitas dalam kompleksitas elemen masyarakat yang bersifat universal, realitas pendidikan dapat menjadi representasi nilai-nilai pluralitas pada pola penyelenggaraannya. Sebagaimana kultur ke-Islam-an yang mengakar kuat sebagai karakteristik Ke-Madura-an sebagai mayoritas keagamaan, perlu dipandang dalam perspektif berbebeda terkait penerimaan terhadap kehadiran lembaga pendidikan berbasis keagamaan non-muslim sebagai kelompok minoritas. Didirikannya SD Katolik Maria Fatima dan SMP Katolik ST. Yusup di Kabupaten Bangkalan di tahun 1952 merupakan lembaga pendidikan dibawah naungan Paroki Yayasan Pendidikan Karmel oleh Keuskupan Malang dari Ordo Hermanas Carmelit (H.Carm).

Teori Wirth dan Garcia tentang tipologi kebijaksanaan nasional terhadap kemajemukan yang membedakan dua kelompok keyakinan dominan (KKD) dan kelompok keyakinan minoritas (KKM) (Saerozi, 2004). Dimana rumusan akan model kebijaksanaan nasional terkait agama terbagi menjadi empat: 1) Model Dominasi; 2) Model Penelantaran; 3) Model Pluralisme Agama; 4) Model Pluralisme Agama Konvensional. Kebijakan pendidikan berbasis keagamaan di Kabupaten Bangkalan memiliki pola konvensional yang menghindari terjadinya dominasi mayoritas atas minoritas dalam implementasinya. Dimana kelompok minoritas dalam konsekuensi imperialisme budaya misalnya, cenderung menghendaki identitas kelompoknya. Sehingga model penyeragaman

sistem pendidikan nasional, dikesampingkan guna memberi peluang kepada berbagai kelompok etnis dan keagamaan untuk mengembangkan pendidikan tersendiri sehingga lahirlah berbagai jenis sekolah seperti halnya sekolah berbasis keagamaan. Menurut Abernethy dan Coombe, sistem pendidikan tunggal dalam masyarakat pluralis umumnya tergantung pada dua hal, yakni sistem tersebut memberi kesempatan yang sama (*equality of opportunity*) pada semua kelompok masyarakat, serta dapat mencairkan perbedaan-perbedaan sosial (Sirozi, 2005).

Negara memberikan perlindungan atas keberadaan agama sebagai realitas sosial yang memberikan perlindungan bagi umat beragama antara lain: 1) Perlindungan hukum; 2) Perlindungan keamanan; 3) Menyediakan fasilitas dan kemudahan menjalankan ibadah; 4) Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Hal ini selaras dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks eksistensi agama di bidang pendidikan, diperlukan perhatian dari lingkungan sekitar guna memberikan ruang penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah berbasis keagamaan. Bukan hanya penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan kelompok keyakinan dominan (KKD) sebagaimana sekolah berbasis keagamaan Islam. Melainkan, penyelenggaraan pendidikan bagi kelompok keyakinan minoritas sebagaimana sekolah berbasis keagamaan Kristen dan Katolik. Pendidikan tidak hanya ditinjau sebagai proses *transfer of knowledge* dan *transfer of value*, melainkan kontestasi kekuasaan diantara pihak-pihak yang berkepentingan, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan, kebijakan-kebijakan, dan konstruksi pengetahuan (Wardhana, 2023a). Pada perspektif pedagogi kritis, kondisi ini bertujuan untuk menghindari legitimasi status quo atas pengaruh konstruksi pendidikan dalam formasi budaya umumnya yang berkembang di masyarakat (Hidayat, 2013). Hal ini sekaligus merepresentasikan penyelenggaraan pendidikan melalui pola pluralisme agama konvensional. Pola tersebut diartikan sebagai ruang penyelenggaraan pendidikan sesuai Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 Ayat 1 dimana "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya."

Pendidikan berbasis keagamaan sebagai subsistem penyelenggaraan pendidikan nasional memiliki nilai penting dan strategis sebagai karakteristik nilai-nilai pluralisme. Pendekatan ini merupakan interpretasi dari ciri serta karakteristik masyarakat majemuk dalam merefleksikan kondisi sosial masyarakat multikultur serta implikasinya pada aksi sosial. Hal ini turut mengasumsikan elemen-elemen ideologis perihal keyakinan yang diterima atas keberagaman masyarakat yang bersifat tentatif dengan perubahan sosial-budaya (Jaenuri, 2022). Bagi Jacques Derrida melalui konsep *difference*, ideologi merupakan suatu bentuk diskursus yang senantiasa ditantagai ketidakstabilan dan ketidaktepatan makna yang menunda perumusan maknanya (Tilaar, 2003). Implementasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah berbasis keagamaan, tertuang pada kesesuaian kurikulum. Kondisi ini sekaligus menghindari praktik dominasi oleh pihak-pihak terkait bagi peserta didik untuk memperoleh hak pendidikan keagamaan. Lain sisi, implementasi penyelenggaraan pendidikan bagi kelompok keyakinan minoritas (KKM), mendorong partisipasi stakeholder terkait guna memfasilitasi peserta didik dalam mendapat hak pendidikan sesuai keyakinannya. Kurikulum SD Maria Fatima dan SMP Kristen ST. Yusup Bangkalan, memperlihatkan bahwa sekolah berbasis keagamaan membangun sistemnya sendiri. Sejalan dengan Singleton yang mengemukakan, bahwa sekolah memiliki "budaya"-nya sendiri (Pradipto, 2007).

Kendati bersifat lokal dan terpisah dari keadaan masyarakat di sekitarnya, sekolah juga merupakan bagian dari institusi sosial yang terkoneksi dengan kultur setempat. Kondisi ini digambarkan sebagai identitas hibrida dari akulturasi sosial antar umat beragama di kalangan masyarakat Madura dimana agama dan entis diposisi setara dalam aktivitas sosialnya. Menurut Wardhana (2023b), dinamika hibrida bergerak kritis dalam posisi subaltern, serta bersifat strategis sebagai upaya penerimaan oposisi biner di ruang publik. Memperhatikan penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan Kristen dan Katolik yang berlangsung, telah memenuhi standar proses yang disyaratkan dalam standar nasional pendidikan. Dalam hal perijizinan, pemerintah daerah memberikan

perlakuan yang sama terkait pemenuhan standarisasi pendidikan nasional yang berlaku tanpa mendiversifikasi dengan sekolah umum maupun sekolah berbasis keagamaan lainnya. Keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting melalui proses dialogis interaksional, sebagai bagian dari konstelasi penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam hal penentuan regulasi kebijakan pendidikan. Rekonsiliasi ini menghadirkan penyelenggaraan pendidikan yang pada akhirnya mengakomodir peserta didik dengan beragam keyakinan keagamaan.

Berangkat dari pandangan reaktif, pemerintah daerah setempat turut berpartisipasi dalam suksesi terpenuhinya berbagai komponen penyelenggaraan pendidikan sekolah berbasis keagamaan Kristen dan Katolik di Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian, wacana atas perlakuan diskriminatif terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah berbasis keagamaan Kristen dan Katolik (Non-Muslim) atas perbedaan keyakinan, dapat mereduksi stereotip yang berkembang mengenai diskursus Ke-Madura-an yang syarat akan kekerasan maupun konflik sosial di dalam masyarakat. Di saat bersamaan, hal ini sekaligus merepresentasikan tentang karakteristik masyarakat Madura yang cukup majemuk dengan kehadiran serta penerimaan lembaga pendidikan berbasis keagamaan Kristen-Katolik di Kabupaten Bangkalan sebagai representasi nilai-nilai pluralitas dalam hal penyelenggaraan pendidikan.

SIMPULAN

Eksistensi agama dalam karakteristik masyarakat multikultur, terepresentasi pada pola penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan. Bukan hanya penyelenggaraan pendidikan bagi kelompok keyakinan dominan (KKD), melainkan ruang bagi kelompok keyakinan minoritas (KKM) seperti halnya umat beragama non-muslim di Kabupaten Bangkalan Madura. Kehadiran SD Maria Fatima dan SMPK ST. Yusup Bangkalan, merupakan perwujudan nilai-nilai kemajemukan di bidang pendidikan yang mengakomodir kepentingan peserta didik beragama Kristen dan Katolik untuk mendapatkan akses pendidikan sesuai dengan sistem keyakinannya. Situasi ini beriringan dengan kultur ke-Islam-an yang mengakar kuat sebagai karakteristik dan identitas Ke-Madura-an dalam merefleksikan penerimaan terhadap kehadiran lembaga pendidikan berbasis keagamaan non-muslim. Proses dialogis interaksional melalui pandangan reaktif

melibatkan peran pemerintah daerah turut serta berkontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan Kristen dan Katolik di Kabupaten Bangkalan. Stereotip yang berkembang mengenai diskursus ke-Madura-an yang syarat akan konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, tereduksi dengan penerimaan lembaga pendidikan berbasis keagamaan Kristen dan Katolik yang merepresentasikan nilai-nilai multikulturalisme sebagai perwujudan pluralisme pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiot, C. E. (2007). Integration of Social Identities in the Self: Toward a Cognitive-Developmental Model. *Personality and Social Psychology Review*, 364-388.
- Amtu, O., Namserna, E., Pattiruhu, C. M., & Romsery, P. (2021). Mengembangkan Kemampuan Metakognisi Guru Pendidikan Agama Kristen Untuk Meningkatkan Pembelajaran Di Kelas. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(2), 145-155. <https://doi.org/10.24176/re.v11i2.5204>
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2023*.
- De Jonge, H. 2012. *Garam Kekerasan dan Aduan Sapi: Esai-Esai tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura*. Yogyakarta: LKiS.
- Denzin, N. K., & Lincoln, L. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fairlough, N. (1995). *Kesadaran Bahasa Kritis*. Semarang: IKIP Semarang.
- Hidayat, R. (2013). *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo.

- Jaenuri, A. (2022). *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*. Surabaya: LPAM.
- Latief, Y. (2005). *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim dan Kuasa*. Bandung: Mizan.
- Lubis, S. A., Budianti, Y., & Zulpadlan, Z. (2022). Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(2), 174–182. <https://doi.org/10.24176/re.v12i2.6400>
- Menchik, J. (2016). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. New York: Cambridge University Press.
- Pradipto, Y. D. (2007). *Belajar Sejati Versus Kurikulum Nasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pribadi, Y. (2013). Jaringan Keagamaan di Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, dan Kiai Sebagai Inti Kebudayaan Santri. *Jurnal Al-Jami'ah: Jurnal Kajian Islam*, 1-32.
- Rambitan, S. R. (2017). Pluralitas Agama dalam Pandangan Kristen dan Implikasinya bagi Pengajaran PAK. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 93-108.
- Ritzer, G., & Goodman, D. (2011). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Saerozi. (2004). *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Historis atas Kebijakan Pendidikan Agama Konvensional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sanapiah, F. (1980). *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sayekti, A. N., Fajrie, N., & Fardani, M. A. (2022). Nilai Religius dan Toleransi dalam Film Animasi “Nusa dan Rara.” *INOPENDAS: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 5(1), 10–19. <https://doi.org/10.24176/jino.v5i1.7455>
- Siddiq, A. (2023). *Kristen Madura: Agama, Identitas, dan Pergulatan*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
- Sirozi, M. (2005). *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Surabaya: Rajawali Press.
- Suntoro, S. (2019). Literasi Informasi Guru Pendidikan Agama Buddha Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(2), 182–191. <https://doi.org/10.24176/re.v9i2.3104>
- Tilaar, H. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: IndonesiaTera.
- Wach, J. (1992). *Ilmu Perbandingan Agama Inti Dan Bentuk Pengalaman Keagamaan*. Jakarta: Rajawali.
- Wardhana, I.J.K. (2023a). *Historiografi Pendidikan Indonesia: Genealogi Pendidikan Karakter dalam Lipatan Kesejarahan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Wardhana, I.J.K. (2023b). Ketersandungan Aliran Kepercayaan dalam Politik Identitas Sistem Pendidikan Nasional. *Dimensi: Journal of Sociology*, 31-35.
- Widodo, H., Fitri, Y., Syafaruddin, S., & Napitupulu, D. S. (2021). Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Dasar Islam Terpadu. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(2), 221–231. <https://doi.org/10.24176/re.v11i2.5480>
- Wiyata, L. (2006). *Carok: Konflik kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKis.